

DIPASTIKAN TERTINGGI DI DIY

UMK Yogya 2024 Berpeluang Tembus Rp 2,5 Juta

YOGYA (KR) - Usai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang telah dilakukan pada Selasa (21/11) kini masing-masing kabupaten dan kota juga mulai menghitung besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2024. UMK Kota Yogya di tahun depan pun berpeluang menembus angka Rp 2,5 juta.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menjelaskan UMP DIY 2024 yang sudah ditetapkan mencapai Rp 2.125.897 atau naik sebesar 7,27 persen dibanding UMP tahun ini.

"Yang pasti Kota Yogya akan tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY. UMK pasti akan naik. Tetapi be-

rapa kenaikannya, kita hitung dulu. Ada proses yang harus dilalui," jelasnya di sela jumpa media, Rabu (22/11).

Proses atau tahapan yang dilakukan Pemkot Yogya dalam merumuskan UMK 2024 antara lain dengan menerjemahkan skema Pemda DIY dalam menetapkan UMP 2024.

Selain itu juga menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Dalam pasal 31 PP tersebut dijelaskan jika UMK lebih tinggi dibanding UMP. Selain itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menghitung besaran UMK. Salah satunya rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota selama tiga tahun dalam periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi.

Oleh karena itu jika ditarik kesimpulan terkait rerata kenaikan UMP maupun UMK dalam beberapa tahun

terakhir, maka UMK Kota Yogya 2024 bisa menembus Rp 2,5 juta. Saat ini UMK Kota Yogya tercatat Rp 2.324.775 atau naik sekitar 7,93 persen dari tahun lalu. Jika persentase kenaikan tersebut diformulasikan untuk menghitung UMK 2024, maka nominal kenaikannya juga tidak signifikan yakni menjadi Rp 2.508.898.

Kendati demikian, Singgih masih belum dapat memastikan jumlah pasti atas proporsi UMK Kota Yogya 2024. Pasalnya, pola yang dipakai oleh Pemda DIY dalam menetapkan UMP 2024 juga masih diterjemah-

kan. Selain itu, pihaknya pun perlu melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, pengusaha dan pekerja. "Intinya masih berproses. Penghitungannya kita sesuaikan aturannya yakni PP 51/2023. Jadi belum bisa kita sampaikan berapa hasilnya," tandasnya.

Sesuai tahapan, UMK 2024 akan diumumkan atau ditetapkan pada 30 November 2023 mendatang. Dua hari sebelumnya, masing-masing kabupaten/kota harus sudah menyerahkan hasil perhitungan tersebut ke Gubernur. **(Dhi)-f**

TERMASUK EKS MOBIL DINAS WALIKOTA

77 Kendaraan Operasional Pemkot Dilelang

YOGYA (KR) - Sebanyak 77 unit kendaraan dinas dan operasional milik Pemkot Yogya bakal dilelang ke masyarakat umum. Proses lelang seluruhnya dilakukan melalui sistem online di laman www.lelang.go.id pada akhir bulan ini.

Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Ridha Hasan, menjelaskan total kendaraan dinas dan operasional yang bakal dilelang meliputi 34 unit sepeda motor, 21 unit kendaraan roda tiga, delapan unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda enam. "Terkait dengan teknis pelaksanaan lelang ini agar diakses melalui online. Jadi nanti peserta bisa mendaftar secara mandiri, untuk prosedur dan mekanisme tersedia pada website tersebut," jelasnya, Senin (20/11).

Di antara puluhan kendaraan bermotor yang bakal dilelang tersebut salah satunya memiliki nilai sejarah karena merupakan eks mobil dinas walikota. Yakni Honda All New Accord VTIL Automatic. Bekas kendaraan jabatan orang nomor satu di Kota Yogya itu juga memiliki nilai limit yang paling tertinggi yakni Rp 150 juta. Uang jaminan yang harus disertakan oleh peserta lelang juga yang tertinggi dibanding kendaraan lain yang dilelang, yakni mencapai Rp 75 juta. Kondisi kendaraan juga masih mulus serta masa aktif pajak hingga September 2024.

Ridha menambahkan, tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu prosedur lelang online. Diharapkan para peserta untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan lelang yang terdapat pada domain tersebut. Lelang bagi masyarakat umum itu akan digelar pada 27 November dan 29 November 2023. "Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis kepada email masing-masing peserta. Untuk penawaran lelang itu sendiri paling sedikit sama dengan nilai limit dan penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali hingga batas waktu," paparnya.

Sementara itu, nilai limit paling rendah ialah Rp 700.000 berupa sepeda motor roda dua jenis Suzuki Shogun tahun pembuatan 2002. Secara umum, kendaraan dinas dan operasional yang dilelang dalam kondisi apa adanya. Sehingga tim lelang Pemkot Yogya tidak menerima komplain dan ganti kerugian terkait kondisi obyek lelang. Oleh karena itu, sebelum mengikuti lelang calon peserta diimbau melihat langsung obyek yang akan dilelang. Lokasinya tersebar di berbagai tempat antara lain gudang aset BPKAD Kota Yogya Jalan Nyi Pembayun, Kantor BPKAD Kota Yogya kompleks balai kota, Terminal Giwangan, Pos Pemadam Kebakaran Jalan Kyai Mojo, serta Pasar Ikan Higienis Jalan Tegalturi. **(Dhi)-f**

SEPEKAN SASAR 18 KELURAHAN

Vaksinasi Rabies Kembali Digulirkan

YOGYA (KR) - Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya kembali mengulirkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan. Selama satu pekan ini ditargetkan 18 kelurahan yang menjadi sasaran.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sri Pangarti, menjelaskan pemberian vaksin rabies kali ini merupakan kelanjutan dari program yang digelar serupa pada September lalu. "Kali ini kami gelar sejak 20 November hingga 28 November mendatang. Selain menasar di 18 kelurahan, kami juga membuka layanan di Poliklinik Hewan Jalan Tegalturi Kota Yogya," jelasnya, Rabu (22/11).

Delapan belas kelurahan yang menjadi sasaran vaksinasi rabies tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Dengan begitu total 45 kelurahan di Kota Yogya ditargetkan sudah terlayani vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan. Terutama jenis kucing, anjing dan kera.

Sri Pangarti menambahkan, total vaksin rabies yang sudah disiapkan hingga akhir tahun 2023 ini berjumlah 4.000 dosis. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 2.500 dosis dan realisasi berjumlah 2.179 ekor. Sedangkan realisasi tahun 2023 tahap pertama sampai dengan September 2023 berjumlah 2.208 ekor di 27 kelurahan di Kota Yogya.

"Semoga dengan bertambahnya vaksin rabies ini akan menambah kesehatan hewan peliharaan dan dosis yang diberikan di Kota Yogya sesuai dengan

target," imbuhnya.

Sementara Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Tri Wahyuningsih, mengungkapkan kegiatan vaksinasi rabies ini sebagai upaya untuk mencegah potensi penularan penyakit rabies. Oleh karena itu bagi warga Kota Yogya bisa mendapatkan vaksin rabies untuk hewan peliharaannya dengan minimal usia hewan peliharaan berusia empat bulan dan sudah diberi obat cacing dengan kondisi yang sehat.

Pihaknya mengatakan, masih ada pemilik yang belum memaksimalkan observasi kesehatan hewan sebelum diberikan vaksin rabies. Jika hewan tidak dalam kondisi sehat, maka bisa terjadi efek sakit setelah diberikan vaksin.

"Kunci utama informasi kesehatan hewan ini sebenarnya dari pemilik. Jika ada kucing habis vaksin sakit, belum tentu karena diberikan vaksin rabies lalu jatuh sakit. Bisa dikarenakan karena belum ada gejala atau tanda-tanda sakit, sehingga setelah diberikan vaksin ini hewan menjadi sakit. Maka sebelum vaksin perlu diobservasi terlebih dahulu," ujarnya.

Selanjutnya, jika hewan sudah diberi vaksin maka tidak diperbolehkan mandi dan keluar rumah selama seminggu. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah hewan terjangkit penyakit dari luar. Dirinya berharap, dengan rutin setiap tahunnya diberikan vaksin rabies gratis di Kota Yogya, hewan peliharaan seperti kucing, anjing dan kera terhindar dari rabies sekaligus mempertahankan status bebas penyakit rabies di DIY. **(Dhi)-f**

YOGYA (KR) - Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) menggelar konferensi dua tahunan yang ketiga bertajuk 'International Conference on Disability Rights (ICDR)-Advancing Disability Rights: Disability Inclusive Development Reimagined' di Kampus UGM Yogyakarta, 21-23 November 2023.

Sesuai dengan tema konferensi, berbagai persoalan, tantangan, dan praktik baik, terkait pelaksanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas atau Disability Inclusive Development (DID) menjadi pokok pembahasan.

Konferensi biennial ini diselenggarakan melalui kerja sama antara AIDRAN dengan UGM dan Fisipol UGM, Australian Catholic University (ACU) Australia, serta didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

ICDR 2023 merupakan forum akademik yang dirancang untuk menjadi tempat bertemunya berbagai aktor yaitu, penyandang disabilitas, akademisi dan peneliti, pembuat kebijakan, mahasiswa, aktivis dari berbagai organisasi penyandang disabilitas, dan penggiat perjuangan hak penyandang disabilitas yang datang dari berbagai negara, terutama dari Australia dan Indonesia.

Simon Ernst, Counsellor Development Effectiveness and Humanitarian, Kedutaan Australia mengatakan, ICDR 2023 merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Australia dan Indonesia, baik pada tingkat kelembagaan maupun hubungan antara warga negara Australia dan Indonesia, people to people.

"Dukungan pemerintah Australia melalui program INKLUSI untuk pelaksanaan konferensi ini, diharapkan semakin menguatkan kerja sama antara pendidikan tinggi di Australia dan Indonesia," tuturnya.

Dr Wawan Masfudi, Dekan Fisipol UGM menuturkan, keragaman tema dan perspektif di ICDR 2023 mencerminkan kebutuhan untuk memahami interseksionalitas hak disabilitas dalam konteks sosial, budaya, dan politik.

"Konferensi ini diharapkan akan memperkaya diskusi, dan mempertajam pemahaman tentang berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di dalam pembangunan," ujar Wawan.

Slamet Thohari, Indonesian Chair AIDRAN mengatakan, sejak berdirinya AIDRAN di tahun 2018 di Melbourne, Australia, AIDRAN berkomitmen untuk terus berupaya mengambil peran dalam mewu-

judkan penghormatan hak penyandang disabilitas melalui penelitian dan advokasi perubahan sosial. Salah satu strateginya adalah AIDRAN menjembatani kerja sama antara lembaga pendidikan di Australia dan Indonesia. **(Dev)-f**

ICDR 2023 DI UGM

Perkuat Kolaborasi Australia-Indonesia

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

"Tubagus Mika Gideon Budiman selaku Penjual akan melaksanakan lelang Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan perantara KPKNL Yogyakarta tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) atas obyek lelang sebagai berikut:

MASYHURISUHAD, DRS., M.M

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan SHM sebagai berikut:

1. SHM No.02565, luas ±97 m² atas nama Nur Hidayani Sarjana Hukum.

2. SHM 1387, luas ±132 m² atas nama Doktorandus Masyhuri Suhad

Terletak di Grojogan, Desa Taman, Kecamatan banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Limit lelang Rp. 710.700.000,- Uang jaminan Rp. 142.140.000,-

Pelaksanaan Lelang: Hari/tanggal: Kamis, 07 Desember 2023

Batas Akhir Penawaran: 10.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Berdasarkan WIB

Alamat Domain: www.lelang.go.id

Tempat Lelang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No. 11, Yogyakarta

Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang E-Auction yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id atau cara mengikuti lelang melalui internet di pilih pada menu tata cara penggunaan pada domain tersebut;

2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada aplikasi E-Auction pada alamat domain angka 1 dengan menggunakan softcopy (scan) KTP, NPWP (tensi file jpg atau png) dan Nomor Rekening atas nama sendiri (Uang jaminan akan dikembalikan ke No. Rekening tersebut jika peserta tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang);

3. Uang Jaminan Lelang Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan lelang yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang disetor sekaligus (bukan dicicil);

b. Satoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

c. Uang jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identifikasi dinyatakan valid/sah.

4. Penawaran lelang Penawaran lelang dimulai dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran dianggap sah dan mengikat adalah penawaran tertinggi.

5. Pengembalian Uang Jaminan

a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dimulai pemindaubukuan ke rekening yang telah didaftarkan;

b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf A tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran Nomor dan Nama Rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengambilan karena mekanisme perbankan;

c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta lelang.

6. Pelunasan Lelang

Penawaran lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara. Penawaran lelang akan dikenakan BPHT sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Obyek dilelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli;

8. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan / atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan / pembeli tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual/pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN;

9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi Tubagus Mika Gideon Budiman 0811-2537-222 dan KPKNL Yogyakarta 0274-544091.

10. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 November 2023

Tubagus Mika Gideon Budiman

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

SUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2024

Penyelenggara Teknis Perlu Terkaver Jaminan Perlindungan

YOGYA (KR) - Pemilu 2024 menjadi pengalaman berharga karena masyarakat akan memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan tingkat daerah hingga pusat serta calon kepala daerah dalam tahun yang sama. Sudah saatnya penyelenggara di tingkat teknis perlu terkaver oleh jaminan perlindungan.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogya Bambang Anjar Jalumurti, mengungkapkan penyelenggara di tingkat teknis tersebut ialah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). "Salah satu tahapan paling krusial ialah pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di sana peran KPPS dan petugas Linmas menjadi ujung tombak. Mereka sangat layak untuk dikaver jaminan perlindungan," ungkapnya.

Jaminan perlindungan yang dimaksud ialah semacam asuransi yang mampu melindungi ketugasan para KPPS maupun Linmas. Baik berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun program sejenisnya. Hal ini supaya penyelenggara teknis tersebut merasa aman hingga mampu bekerja dengan lebih tenang dan optimal.

Bambang Anjar Jalumurti
Fraksi PKS



KR-Istimewa

Bambang menilai masih cukup waktu untuk merumuskan bentuk jaminan perlindungan bagi KPPS maupun Linmas. Sesuai tahapan, penyelenggara teknis harus sudah dibentuk H-14 pemungutan suara. Sehingga jika pemungutan suara bakal digelar 14 Februari 2024 maka paling lambat akhir Januari 2024 sudah harus terbentuk. "Baik KPU, Bawaslu maupun Pemkot Yogya bisa saling berkoordinasi terkait hal ini. Ketika ada jaminan perlindungan, tentu minat masyarakat menjadi bagian dari KPPS maupun Linmas akan meningkat. Kendala yang terjadi di Pemilu 2019 lalu juga bisa diminimalisir," urainya.

Apalagi jumlah KPPS dan Linmas yang dibutuhkan Kota Yogya cukup banyak. Dari total 1.298 TPS, masing-masing dibutuhkan tujuh petugas KPPS dan dua petugas Linmas. Dengan demikian total penyelenggara teknis mencapai 11.682 orang. Ketugasan mereka juga sangat krusial mulai menyiapkan lokasi TPS, melayani pemilih hingga rekapitulasi suara dalam satu waktu. "Menjadi harapan kita bersama agar seluruh penyelenggara pemilu mampu bekerja dengan profesional dan merasa aman. Baik di tingkat kota, kementren, kelurahan hingga paling bawah di tingkat TPS," tandasnya. **(Dhi)-f**

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
No: 10267/Peng-33.01.HP.03.02/XI/2023

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	a. Nama Pemohon	b. No. Hak Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Desa / Kel. b. Kecamatan
1	a. ENDANG PRAKOSO WIBOWO, SE b. Sidanegara Indah Blok 8 No. 274 RT.001 RW.018 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap	a. Pengelolaan b. 5 c. 13.978 m ²	PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	03/09/2003	a. Bajing b. Kroya
a. SUKIRNO b. Dusun Sidasari, RT.005 RW.005 Desa Tambaksari, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	a. Milik b. 26 c. 775 m ²	SUKIRNO	10/09/2013	a. Muktisari b. gandrungmangu	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

2023, 15 November 2023
Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Cilacap

KUSUMANEGERA, A.Pub.S.H.M.SI
Telp. 5468128 198903 1 004